



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA
JASA KEUANGAN, JASA PENILAI DAN MANUFAKTUR**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta - 13120
Telepon: (021) 85908090 Faksimile: (021) 85908090

Nomor : OT.04/LKIN-49/D403/1/2023 31 Maret 2023
Hal : Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan
Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai,
dan Manufaktur Triwulan I Tahun 2023

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur Triwulan I Tahun 2023 sebagai berikut:

A. Capaian Outcome Triwulan I Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Capaian Outcome
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur
Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Strategis (Sastra)/IKU	Satuan	Target 2023	Realisasi Tw-1	Capaian (%) 2022
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha terhadap Keuangan Negara dan Daerah				
1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah	16	Nihil	Nihil
1.2	Jumlah BUMN dengan kinerja sehat	Jumlah	19	Nihil	Nihil
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional				
2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah	14	Nihil	Nihil
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha				
3.1	Jumlah badan usaha dengan efektivitas operasional baik	Jumlah	20	Nihil	Nihil
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD				
4.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	12	4	33,33
5	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha				
5.1	Jumlah badan usaha dengan akuntabilitas badan usaha yang baik	Jumlah	11	Nihil	Nihil

No	Sasaran Strategis (Sastra)/IKU	Satuan	Target 2023	Realisasi Tw-1	Capaian (%) 2022
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha				
6.1	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	48	48	100,00
6.2	Jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	10	7	70,00
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara				
7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	80	Nihil	Nihil
7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	Nihil	Nihil
7.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1	1	100,00
8	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara				
8.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	Nihil	Nihil
8.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	Nihil	Nihil
9	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja pada Deputi Bidang Akuntan Negara				
9.1	Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan	Persen	100	Nihil	Nihil
9.2	Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu	Persen	100	Nihil	Nihil
9.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja	Persen	100	Nihil	Nihil

Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana Tabel 1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha terhadap Keuangan Negara dan Daerah
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis (sastra) 1 ditunjukkan dengan pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik.
2. Jumlah BUMN dengan kinerja sehat.

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 1 adalah sebagai berikut:

**1.1.
Jumlah
badan usaha
dengan
tingkat
dukungan
fiskal
terhadap
keuangan
negara dan
daerah
kategori baik**

Badan Usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara/daerah kategori baik adalah badan usaha yang mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Penilaian dilakukan melalui pengukuran Dimensi 2 ICORPAX (*Indonesian Corporate Accountability Index*), yaitu akuntabilitas korporasi pada keuangan negara.

Pengukuran atas dimensi ini didasarkan pada tujuan BUMN dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara yang signifikan dalam berbagai jenis pajak dan dividen. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan ini, maka syarat utama yang harus terpenuhi adalah korporasi harus memiliki tingkat kesehatan yang baik, ditinjau dari sisi finansial, operasional, dan administrasi.

Tingkat keberhasilan terhadap dimensi ini diukur dengan 2 indikator yaitu Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi dan Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara, yang didukung dengan parameter sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi
 - a. Kesehatan Keuangan Korporasi.
 - b. *Growth* Kinerja Keuangan.
2. Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara
 - a. Capaian target *dividend payout ratio*.
 - b. Persentase realisasi pembayaran pajak.
 - c. Persentase realisasi pembayaran penerimaan negara lainnya.
 - d. Kontribusi dividen BUMN terhadap target dividen nasional (APBN).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sejumlah 16 badan usaha dengan kategori “Baik”.

Per Triwulan I Tahun 2023, belum ada penugasan terkait ICORPAX, sehingga capaian atas target indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 adalah nihil.

**1.2.
Persentase
BUMN
dengan
Kinerja Sehat**

Tingkat kesehatan keuangan korporasi diukur dengan menggunakan parameter kesehatan keuangan korporasi dan *growth* kinerja keuangan. Pengukuran menggunakan hasil skor Dimensi 2 ICORPAX, yaitu Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara. Dimensi ini terdiri dari 2 parameter, yaitu Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (bobot 5%) dan Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara (bobot 5%). Sub parameter yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (bobot 5%)
 - a. Kesehatan Keuangan Korporasi.
 - b. *Growth* Kinerja Keuangan dalam periode 2 tahun.
2. Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara (bobot 5%)
 - a. Capaian target *dividen payout ratio*.
 - b. Persentase realisasi Pembayaran Pajak.
 - c. Persentase realisasi pembayaran Penerimaan Negara Lainnya.
 - d. Kontribusi dividen BUMN terhadap target dividen nasional (APBN).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada tahun 2023 sebesar 19 BUMN dengan Kinerja Sehat.

Per Triwulan I Tahun 2023, belum ada pengawasan yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan korporasi tahun 2023, sehingga capaian atas target indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 adalah nihil.

2**Sasaran Strategis 2:****Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional**

Pencapaian Sasaran Strategis 2 ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 2 adalah sebagai berikut:

**2.1.
Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik**

Badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik adalah badan usaha yang mampu mendukung pembangunan nasional. Dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional diukur dengan menggunakan parameter tingkat kinerja dan tingkat dukungan pada agenda pembangunan. Tingkat kinerja korporasi dinilai berdasarkan capaian KPI Korporasi atau KPI Direksi yang mewakili korporasi, yang terdapat di dalam *annual report*.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 1 ICORPAX, yaitu Dukungan Korporasi pada Pembangunan yang terdiri dari 2 parameter serta dijabarkan ke dalam 4 sub parameter utama dan satu sub parameter penalti, yaitu:

1. Tingkat Kinerja Korporasi (bobot 7,5%)
 - a. Pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI).
2. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan (bobot 22,5%)
 - a. Kesesuaian produk lini bisnis utama terhadap program prioritas pemerintah.
 - b. Penugasan pemerintah.
 - c. Cakupan penugasan pemerintah.
 - d. Pencapaian target penugasan.
 - e. Penugasan dari Pemerintah yang bermasalah.

Sedangkan, untuk sub parameter penalti akan diberikan tergantung pada keberadaan informasi mengenai apakah terdapat proyek-proyek atau penugasan Pemerintah pada korporasi yang mangkrak/berhenti/terbengkalai.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada tahun 2022 sejumlah 14 badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik.

Per Triwulan I Tahun 2023, belum ada pengawasan yang dilakukan untuk mengukur badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik, sehingga capaian atas target indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 adalah nihil.

3

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Strategis 3 ditunjukkan pencapaian satu indikator kinerja yaitu Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik, dengan kriteria BUMN yang mampu:

1. Mengelola proses bisnisnya dengan baik.
2. Memiliki skor kepuasan pelanggan yang baik.
3. Mengelola aset dengan efektif.
4. Melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR dan TJSL) secara efektif.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 3 adalah sebagai berikut:

3.1. Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX, yaitu Kepatuhan dan Efektivitas Operasional dengan rincian parameter untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepatuhan
 - Permasalahan Hukum yang Dihadapi.
 - Kepatuhan terhadap Regulasi Industri Tertentu.
- b. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
 - Keberadaan Struktur Pengelola TJSL.
 - Keselarasan Program TJSL dengan Program prioritas pencapaian SDG's.

- Keberadaan Program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan *creating share value* (CSV) bagi perusahaan.
 - Jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha.
- c. Tingkat Kepuasan
- Indeks Kepuasan Pelanggan.
 - Indeks Kepuasan *Vendor*.
 - *Employee Engagement*.
- d. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis
- Capaian KPI Operasional Korporasi.
 - Penerapan *E-Procurement*.
 - Keberadaan Inovasi.
 - Penerapan Teknologi Informasi.
 - Pengelolaan SDM.
- e. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset
- *Asset Management Policy*.
 - *Asset Management Plans*.
 - *Asset Portfolio*.
 - Persentase Nilai Aset *Idle* terhadap Total Aset.
 - *ROA (Return on Asset)*.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sebanyak 20 badan usaha dengan efektivitas operasional baik.

Per Triwulan I Tahun 2023, belum ada pengawasan yang dilakukan untuk mengukur badan usaha dengan efektivitas operasional baik, sehingga capaian atas target indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 adalah nihil.

4**Sasaran Strategis 4:****Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD**

Pencapaian Sasaran Strategis 4 ditunjukkan dengan jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 4 adalah sebagai berikut:

**4.1.
Jumlah BUMN
dengan Tata
Kelola
Korporasi
Baik**

BUMN memiliki peran penting sebagai agen pembangunan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, BUMN harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan untuk memastikan perusahaan berjalan pada koridor yang seharusnya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai payung hukum bagi korporasi, khususnya BUMN agar menjalankan perusahaannya dengan tata kelola yang baik. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015, BUMN diharuskan melakukan asesmen terhadap tata kelola dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal. Asesmen penerapan GCG ditujukan untuk memastikan efektivitas penerapan dan perbaikan tata kelola BUMN.

Asesmen penerapan GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, serta kriteria dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Asesmen GCG dilakukan melalui penilaian atas 572 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil asesmen berupa skor GCG, sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik. Indikator persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik diukur dengan menggunakan jumlah BUMN dengan tata kelola baik dibagi jumlah total BUMN.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sebanyak 12 BUMN dengan tata kelola korporasi baik.

Per Triwulan I Tahun 2023 telah dilakukan asesmen terhadap 4 BUMN dengan hasil sebanyak 4 BUMN dengan kategori "Sangat Baik", sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 33,33% (4/12).

Daftar 4 BUMN yang telah dilakukan *assessment* GCG adalah sebagai berikut:

No	BUMN/Anak Perusahaan	Skor	Predikat
1	PT Permodalan Nasional Madani	88,251	Sangat Baik
2	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	89,071	Sangat Baik
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	88,170	Sangat Baik
4	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	87,344	Sangat Baik

5**Sasaran Strategis 5:
Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha**

Pencapaian Sasaran Strategis 5 ditunjukkan dengan jumlah BUMN yang dapat memperoleh nilai baik pada hasil pengukuran akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara dipisahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 5 adalah sebagai berikut:

**5.1.
Jumlah
Badan Usaha
dengan
Akuntabilitas
Badan Usaha
yang Baik**

Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dari korporasi pada umumnya. Dalam kapasitas demikian, BUMN memiliki kewajiban akuntabilitas bukan hanya kepada pemilik saham tetapi juga pada *stakeholders* yang lebih luas. Sesuai pengungkapan OECD dimana BUMN memiliki kompleksitas dalam akuntabilitas, maka penilaian atas akuntabilitas BUMN harus diukur tidak hanya dalam satu dimensi penilaian kinerjanya saja, tetapi juga memperhatikan dimensi-dimensi lainnya.

Pengukuran indikator kinerja meningkatnya akuntabilitas Badan Usaha dilakukan dengan menggunakan total skor penilaian indeks akuntabilitas BUMN (*Indonesian Corporate Accountability Index/ICORPAX*). ICORPAX sebagai suatu instrumen yang dikembangkan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP bertujuan untuk mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola KNYD dalam rangka mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN itu sendiri. Indeks ini disebut ICORPAX karena instrumen yang dihasilkan merupakan rancangan pengukuran yang mencakup seluruh parameter pengukuran individual atas peran BUMN sebagai korporasi milik negara.

Pengukuran akuntabilitas Badan Usaha dilakukan dengan menggunakan penilaian komposit dari 5 dimensi dalam pengukuran ICORPAX, yaitu:

1. Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan.

2. Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara.
3. Kepatuhan dan Efektivitas Operasi.
4. Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi.
5. Efektivitas Pengendalian *Fraud*.

Simpulan penilaian kemudian dibuat berdasarkan penilaian terhadap kelima dimensi tersebut dengan menggunakan pembobotan untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

I. *Lagging Indicators*

1. Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan
 - a. Tingkat Kinerja Korporasi.
 - b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan.
2. Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara
 - a. Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi.
 - b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara.

II. *Leading Indicators*

1. Kepatuhan dan Efektivitas Operasional
 - a. Tingkat Kepatuhan.
 - b. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
 - c. Tingkat Kepuasan.
 - d. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis.
 - e. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset.
2. Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi
 - a. Tingkat Efektivitas Tata Kelola Perusahaan (GCG).
 - b. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko.
 - c. Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawas Internal.
 - d. Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
3. Efektivitas Pengendalian *Fraud* (10%)
 - a. *Anti Fraud Policy*.
 - b. *Fraud Risk Assessment*.

c. *Fraud Detection, Prevention and Correction*.

d. Tingkat Kejadian *Fraud* (*Penalty* terhadap total nilai capaian ICORPAX).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada tahun 2023 sejumlah 11 BUMN dengan akuntabilitas baik.

Per Triwulan I Tahun 2023, belum ada pengawasan yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas badan usaha, sehingga capaian atas target indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 adalah nihil.

6

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha, ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3.
2. Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3.

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 6 adalah sebagai berikut:

**6.1.
Jumlah
BUMN
dengan MRI \geq
Level 3**

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara, Manajemen Risiko (MR) adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, dan mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.

Asesmen tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (*risk management maturity level*) pada Badan Usaha (BUMN, BUMD, BLUD). Tujuannya untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, serta

memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan level maturitas ≥ 3 menunjukkan bahwa MR perusahaan, antara lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMN yang dilakukan asesmen maturitas dan *mapping* manajemen risiko. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil MRI yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sebanyak 48 BUMN dengan MRI \geq Level 3.

Per Triwulan I Tahun 2023, terdapat 48 BUMN dengan MRI \geq Level 3, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100,00% (48/48).

Rincian 48 BUMN dengan MRI \geq Level 3 disajikan dalam Lampiran 1.

**6.2.
Jumlah
BUMN
dengan
Kapabilitas
SPI \geq Level 3**

Dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, korporasi perlu mengevaluasi kualitas fungsi audit internal (Satuan Pengawasan Intern) untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi audit internal, SPI harus menilai kapabilitasnya dan melaksanakan rekomendasi perbaikan.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 28 ayat (6) menyebutkan

bahwa Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Evaluasi kualitas fungsi pengawasan intern tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, Sekretaris Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan reviu (*assessment*) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan dari *stakeholders*-nya.

Peraturan di atas memperkuat opini mengenai penguatan fungsi audit internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja melalui manajemen penyelenggaraan korporasi yang sehat dan kuat. Hal ini disebabkan audit internal memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan korporasi serta mencegah dilakukannya tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN dilakukan dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Indikator ini diukur dengan menggunakan Jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sebanyak 10 BUMN dengan kapabilitas SPI \geq Level 3.

Per Triwulan I Tahun 2023, belum dilakukan kegiatan penilaian kapabilitas SPI pada BUMN. Capaian kapabilitas SPI dihitung secara kumulatif atas hasil penilaian yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerja BUMN dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 per Triwulan I Tahun 2023 adalah sebanyak 7 BUMN, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 70,00% (7/10).

Daftar 7 BUMN dengan capaian kapabilitas SPI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama BUMN/Anak Perusahaan	Level
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	3
2	PT Petrokimia Gresik (PKG)	3
3	PT Pupuk Kujang (PKC)	3
4	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	3
5	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	3 DC
6	PT Industri Kereta Api (Persero)	3
7	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	3 DC

7 Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara

Pencapaian Sasaran Strategis 7: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara, ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan.
2. Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi.
3. Jumlah Inovasi Layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan.

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 7 adalah sebagai berikut:

7.1. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan

Target indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada tahun 2023 adalah sebesar 80 (skala 1 s.d. 100). Realisasi indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur berdasarkan hasil survei

kepuasan *stakeholders* yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

**7.2.
Jumlah
Layanan
Eksternal Yang
Dapat
Dijalankan
Menggunakan
Teknologi
Informasi**

Tahun 2022 Deputi Bidang Akuntan Negara mengembangkan aplikasi FORSA untuk memantau kinerja seluruh unit kerja Direktorat dan Perwakilan disamping sebagai alat bantu (*tools*) untuk menyusun Laporan Hasil Pengawasan Deputi Bidang Akuntan Negara.

Aplikasi FORSA secara kontinu dilakukan pembaruan fitur untuk mengakomodasi perubahan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara.

Hasil pengawasan intern dipantau secara berkala dengan tujuan mengingatkan unit kerja yang belum menginput sintesa hasil pengawasan dalam aplikasi FORSA. Sintesa Hasil pengawasan menjadi bahan yang paling signifikan pada saat menyusun Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan kepada Presiden dan Menteri BUMN.

Penilaian capaian indikator ini berdasarkan implementasi aplikasi FORSA akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

**7.3.
Jumlah
Inovasi
Layanan**

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Akuntan Negara mengembangkan aplikasi *GCG on Cloud* untuk memudahkan validasi skor hasil asesmen GCG pada BUMN, serta sebagai sarana penyimpanan *database* profil BUMN. Pada Triwulan I Tahun 2023, aplikasi *GCG on Cloud* masih dalam pengembangan oleh *system programmer*, sehingga belum dapat diimplementasikan oleh pengguna.

Secara umum, aplikasi *GCG on Cloud* nantinya akan memuat Profil BUMN, Skor Hasil Asesmen GCG (sampai dengan Unsur Penilaian/UP), dan dapat mencetak

ringkasan skor hasil asesmen untuk ditandatangani oleh mitra.

Berdasarkan pengembangan aplikasi yang telah dilakukan sebagai inovasi layanan, realisasi indikator jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan pada Triwulan I Tahun 2023 adalah sebanyak 1 (satu) aplikasi.

8

**Sasaran Strategis 8:
Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada
Deputi Bidang Akuntan Negara**

Pencapaian Sasaran Strategis 8: Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara, ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja).
2. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja).

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 8 adalah sebagai berikut:

8.1.

**Persentase
Efektivitas
Pengendalian
Intern (SPIP
Unit Kerja)**

Target indikator kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) pada tahun 2023 adalah 70%. Pengendalian intern efektif jika hasil analisis atas risiko inheren dapat menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat risiko yang dapat diterima atau berada di bawah selera risiko. Penilaian capaian indikator ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

8.2.

**Persentase
Penyelesaian
RTP (MRI
Unit Kerja)**

Target indikator kinerja ini adalah 100% yang artinya seluruh RTP telah dilaksanakan. Penilaian capaian indikator ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

9

**Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja pada Deputi Bidang
Akuntan Negara**

Pencapaian Sasaran Strategis 9: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja pada Deputi Bidang Akuntan Negara, ditunjukkan oleh pencapaian tiga

indikator kinerja yaitu:

1. Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan.
2. Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu.
3. Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja.

Uraian kinerja atas 3 indikator kinerja sastra 8 adalah sebagai berikut:

<p>9.1. Persentase Keselarasan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan Agenda Prioritas Pengawasan</p>	<p>Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja dan Agenda Prioritas Pengawasan. Program Kerja Pengawasan Tahunan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur telah selaras dengan Perjanjian Kinerja dan Agenda Prioritas Pengawasan. Penilaian capaian indikator ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.</p>
<p>9.2. Persentase Dokumen Pelaporan Manajerial BPKP Yang Disusun Tepat Waktu</p>	<p>Indikator kedua untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 9 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja pada Deputi Bidang Akuntan Negara adalah Persentase Dokumen Pelaporan Manajerial BPKP yang Disusun Tepat Waktu. Dokumen pelaporan manajerial yang disampaikan adalah Laporan Kinerja.</p> <p>Laporan Kinerja disusun setiap triwulan dan wajib disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola (Biro MKOT) setiap tanggal 7 pada akhir triwulan.</p>
<p>9.3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan</p>	<p>Laporan Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara Triwulan I Tahun 2022 disampaikan tepat waktu.</p> <p>Indikator ketiga untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 9: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja pada Deputi Bidang Akuntan Negara adalah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Manajemen</p>

Manajemen Kinerja

Kinerja. Indikator ini diukur berdasarkan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022 dari Inspektorat yang telah ditindaklanjuti. Penilaian capaian indikator ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

B. Capaian *Output* Pengawasan Triwulan I Tahun 2023

Realisasi capaian *output* pengawasan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur per Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 6 laporan atau mencapai 33,33% dari target *output* RO pada RKA tahun 2023 sebanyak 18 laporan, sebagaimana pada tabel berikut:

Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan BPKP Triwulan I Tahun 2023
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur

No	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi Tw I 2023	Capaian (%)
1	4223.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	4	1	25,00
2	4223.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	1	50,00
3	4223.UAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	4	1	25,00
4	4223.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	1	100,00
5	4223.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	2	2	100,00
6	4223.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1	-	-
7	4223.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	-	-

C. Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, belum dijumpai kendala yang dapat menghambat pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan.

D. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, telah terealisasi anggaran sebesar Rp387.753.300,00 atau 20,91% dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.854.145.000,00 dengan ringkasan sebagaimana tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur

No	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw I 2023 (Rp)	Capaian (%)
1	4223.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	437.600.000	6.495.000	1,48
2	4223.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	250.000.000	101.087.300	40,43
3	4223.UAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	500.000.000	114.718.600	22,94
4	4223.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	86.400.000	26.629.500	30,82
5	4223.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	337.600.000	75.072.900	22,24
6	4223.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	21.600.000	-	-
7	4223.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	220.945.000	63.750.000	28,85

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur. Atas perkenan Ibu Deputi untuk memberikan arahan lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik

R. Ersi Soenarsih

Rincian 48 BUMN dengan MRI \geq Level 3

No	Badan Usaha	Level	Predikat
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
2	PT Petrokimia Gresik (PKG)	4	<i>Managed</i>
3	PT Pupuk Kujang (PKC)	3	<i>Defined</i>
4	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	3	<i>Defined</i>
5	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	4	<i>Managed</i>
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)	3	<i>Defined</i>
7	PT Rekayasa Industri (REKIN)	3	<i>Defined</i>
8	PT Mega Eltra (ME)	3	<i>Defined</i>
9	PT Pupuk Indonesia Logistik (PILog)	3	<i>Defined</i>
10	PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP)	3	<i>Defined</i>
11	PT LEN Industri (Persero)	3	<i>Defined</i>
12	PT Pindad (Persero)	3	<i>Defined</i>
13	PT PAL Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
14	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
15	PT Sucofindo (Persero)	3	<i>Defined</i>
16	PT Surveyor Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
17	PT Bio Farma (Persero)	4	<i>Managed</i>
18	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	4	<i>Managed</i>
19	PT Pegadaian (Persero)	4	<i>Managed</i>
20	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	3	<i>Defined</i>
21	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	3	<i>Defined</i>
22	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
23	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
24	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
25	Perum Jaminan Kredit Indonesia	4	<i>Managed</i>
26	PT Jasa Raharja (Persero)	4	<i>Managed</i>
27	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	3	<i>Defined</i>
28	PT ASABRI (Persero)	4	<i>Managed</i>
29	PT TASPEN (Persero)	5	<i>Optimized</i>
30	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	4	<i>Managed</i>
31	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	4	<i>Managed</i>
32	PT Semen Gresik	3	<i>Defined</i>
33	PT Semen Padang	4	<i>Managed</i>
34	PT Semen Tonasa	4	<i>Managed</i>
35	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	3	<i>Defined</i>
36	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
37	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	3	<i>Defined</i>
38	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
39	PT Industri Kereta Api (Persero)	3	<i>Defined</i>
40	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	3	<i>Defined</i>
41	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
42	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	3	<i>Defined</i>
43	PT Bank Syariah Indonesia	3	<i>Defined</i>

No	Badan Usaha	Level	Predikat
44	PT Asuransi Ekspor Indonesia	4	<i>Managed</i>
45	PT Bahana Sekuritas	3	<i>Defined</i>
46	PT Asuransi Jiwa IFG	3	<i>Defined</i>
47	PT Bahana Kapital Investa	3	<i>Defined</i>
48	PT Bahana TCW Investment Management	3	<i>Defined</i>